

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2027. NOTA KEUANGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2027

Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027 menjelaskan rencana kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai dasar pembahasan RAPBD antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Arah pembangunan tahun 2027 mengangkat tema “Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.” Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,017 triliun, terdiri atas PAD Rp582,760 miliar dan pendapatan transfer Rp2,434 triliun. Pemerintah Daerah mengidentifikasi tingginya ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat, keterbatasan sarana pelayanan pajak dan retribusi terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai persoalan pendapatan. Kebijakan peningkatan pendapatan antara lain ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, perluasan transaksi elektronik, optimalisasi aset, peningkatan kinerja BUMD dan BLUD, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,092 triliun dan diarahkan pada lima prioritas pembangunan. Program yang berkaitan langsung dengan masyarakat antara lain penanggulangan kemiskinan berbasis data, Gerakan Pangan Murah, pencegahan stunting dan peningkatan gizi, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, pencegahan kematian ibu dan bayi, pemberdayaan pesantren dan pendidikan keagamaan, perluasan kesempatan kerja, pemberian insentif informal termasuk PKL, pemberdayaan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, serta pengembangan pariwisata dan Geopark Kebumen. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, jaringan irigasi, akses air minum, penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim. Pemerintah Daerah juga mencatat bahwa alokasi untuk pendidikan dan kesehatan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, tetapi alokasi belanja infrastruktur masih perlu ditingkatkan.

RAPBD Tahun Anggaran 2027 mengalami defisit sebesar Rp75,228 miliar yang ditutup melalui pembiayaan neto dengan jumlah yang sama. Penerimaan pembiayaan direncanakan Rp111,772 miliar, terutama berasal dari prediksi SiLPA tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp36,544 miliar meliputi pembentukan dana cadangan Rp20 miliar, penyertaan modal daerah Rp14,444 miliar, dan pemberian pinjaman daerah Rp2,1 miliar. Dokumen menegaskan bahwa perencanaan tersebut disusun dalam kondisi kemampuan fiskal yang terbatas sehingga prioritas anggaran perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan program yang memberikan hasil nyata. Secara keseluruhan, RAPBD 2027 menempatkan penanggulangan kemiskinan, pemenuhan pelayanan dasar, pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, dan pengembangan pariwisata sebagai bagian penting dari arah penggunaan anggaran Kabupaten Kebumen.

Catatan:

- Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2027 serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang disepakati Pemerintah Kabupaten Kebumen dan DPRD pada 6 Agustus 2026.
- Lima prioritas pembangunan daerah tahun 2027 meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan; peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi; peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan; peningkatan tata kelola pemerintahan; serta peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat, dan pemajuan kebudayaan.
- Dokumen menyatakan seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 telah terakomodasi dan mendukung prioritas pembangunan nasional.

- Alokasi transfer dari Pemerintah Pusat masih menggunakan asumsi karena informasi resmi Transfer Keuangan ke Daerah Tahun Anggaran 2027 belum diterbitkan pada saat dokumen disusun.
- Nota Keuangan ditetapkan di Kebumen pada 9 September 2026 dan ditandatangani oleh Bupati Kebumen Hj. Lilis Nuryani.

Tag/Keyword: Nota Keuangan; RAPBD 2027; APBD Kabupaten Kebumen; Keuangan Daerah; Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur; Pelayanan Publik; UMKM; Pertanian; Pariwisata

SUMMARY

KEBUMEN REGENCY, 2027. FINANCIAL NOTE ON THE DRAFT REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET OF KEBUMEN REGENCY FOR FISCAL YEAR 2027

The Financial Note on the Draft Regional Revenue and Expenditure Budget (RAPBD) of Kebumen Regency for Fiscal Year 2027 outlines the planned policies for regional revenue, expenditure, and financing as the basis for deliberation between the Regional Government and the Regional House of Representatives (DPRD). The 2027 development policy carries the theme of “Infrastructure Fulfillment to Strengthen Accessibility to Basic Services and Tourism Development for Accelerated Poverty Alleviation.” Regional revenue is projected at IDR 3.017 trillion, comprising IDR 582.760 billion in Regional Own-Source Revenue and IDR 2.434 trillion in transfer revenue. The document identifies continued dependence on Central Government transfers, limited tax and levy service facilities particularly in the use of information technology, and underutilized regional assets as major revenue challenges. Revenue policies therefore include tax and levy intensification and extensification, database updating, expansion of electronic transactions, optimization of regional assets, improved performance of region-owned enterprises and public service agencies, and better services for taxpayers and levy payers.

Regional expenditure is planned at IDR 3.092 trillion and is directed toward five regional development priorities. Programs with direct relevance to the public include data-based poverty alleviation, affordable food initiatives, stunting prevention and nutrition improvement, improved access to health and education, prevention of maternal and infant mortality, support for Islamic boarding schools and religious education, employment expansion, empowerment of informal workers and micro, small and medium enterprises, increased agricultural and fisheries productivity, and the development of tourism and Kebumen Geopark. Infrastructure priorities include improving roads and bridges, irrigation networks, access to drinking water, handling slum areas and inadequate housing, sanitation, waste and wastewater management, as well as climate change and disaster mitigation. The document notes that education and health allocations have met statutory requirements, while infrastructure expenditure still needs to be increased.

The 2027 Draft APBD records a deficit of IDR 75.228 billion, which is planned to be covered by an equivalent amount of net financing. Financing receipts are projected at IDR 111.772 billion, mainly from the estimated previous-year budget surplus (SiLPA), while financing expenditures of IDR 36.544 billion include the establishment of reserve funds, regional capital participation, and regional loans. Within the constraints of regional fiscal capacity, the budget is intended to prioritize community needs and programs capable of delivering tangible results. Overall, the 2027 Draft APBD places poverty alleviation, basic services, equitable infrastructure development, strengthening the local economy, and tourism development among the central directions of Kebumen Regency's budget policy.

Note:

- *The Financial Note was prepared based on the 2027 Regional Government Work Plan (RKPD) and the 2027 KUA-PPAS agreed upon by the Kebumen Regency Government and DPRD on August 6, 2026.*
- *The five regional development priorities cover human resource development and poverty alleviation; economic productivity and competitiveness; equitable and environmentally sustainable infrastructure; good governance; and public security, order, and cultural advancement.*
- *The document states that all Kebumen Regency development priorities for 2027 are aligned with and support national development priorities.*
- *Central Government transfer allocations remain assumption-based because official 2027 Regional Transfer information had not yet been issued when the document was prepared.*
- *The Financial Note was signed in Kebumen on September 9, 2026, by Regent of Kebumen Hj. Lilis Nuryani.*